

Destabilisasi Relasi Otoritas Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember

Destabilization of the Relationship between the Regent Authority and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) in Jember

Nurul Azizah¹

Universitas Ibrahimy, Situbondo¹
email : unibsitubondo2022@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengeksplorasi dan membahas destabilitas relasi kewenangan, konflik politik antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan disharmoni yang terjadi inilah yang berakibat terhadap pemakzulan Bupati. pola resolusi konflik politik dan disfungsi komunikasi menjadi persoalan utama. Persoalan Konflik politik antara Bupati dan partai-partai yang ada di Legislatif. menjadi marak pada fenomena pemilihan kepala daerah langsung. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan paradigma struktural-fungsionalisme Dahrendorf. Data lapangan terdiri dari teks naratif pada serangkaian peristiwa berdasarkan pengalaman pribadi. Data ini berupa transkrip narasi data untuk mengurangi bias melalui perbandingan antar subjek dan dianalisis secara komprehensif. Studi ini menemukan keselarasan, determinan, arketipe rekonsiliasi, poin-poin fundamental, dan prasyarat untuk resolusi. Kesimpulan penelitian ini adalah terjadinya konflik politik antara kepala daerah dan DPRD disebabkan *abuse of power* partai-partai politik di Parlemen. Saran dan rekomendasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif hendaknya selarasan dan berintegrasi dalam relasi otoritas, sehingga terbangun struktural fungsional antar lembaga.

Kata kunci: Teori Konflik, Relasi Kewenangan, Abuse of Power, Pemakzulan, Politik Lokal

Abstract

This article explores and discusses the destability of authority relations and political conflicts between regional heads and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). It was this disharmony that ensued that resulted in the impeachment of the Regent. Patterns of political conflict resolution and communication dysfunction are the main issues. The issue of political conflict between the Regent and the parties in the Legislature. It became rampant in the phenomenon of regional elections directly. This research was conducted qualitatively, using the paradigm of Dahrendorf's structural-functionalism. Field data consists of narrative texts on a series of events based on personal experience. This data is in the form of transcripts of data narratives to reduce bias through comparisons between subjects and is comprehensively analyzed. The study found alignment, determinants, reconciliation archetypes, fundamental points, and prerequisites for resolution. This study concludes that there is a political conflict between regional heads and the DPRD due to the abuse of power of political parties in Parliament. Suggestions and recommendations to executive and legislative institutions should be integrated with authority relations to establish a functional structure between agencies.

Keywords: Conflict Theory, Relation of Authority, Abuse of Power Impeachment, Local Politics

PENDAHULUAN

Disharmonisasi, miskomunikasi dan konflik sosial struktural fungsional: kepemimpinan perempuan kepala daerah menjadi fenomena di berbagai daerah di Indonesia. Konflik antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahkan ada yang berakhir dengan pemakzulan kepala daerah. Seperti halnya yang terjadi yang terjadi di Jember Jawa Timur Indonesia. Konflik serta buruknya komunikasi antara Bupati dengan DPRD sudah berlangsung lama sejak masa periode 2014-2019. Hubungan disharmoni kepala daerah dan DPRD di Kabupaten Jember memanas disaat DPRD melakukan interpelasi tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Jember dan Puncaknya berakhir dengan pemakzulan Bupati oleh DPRD secara kuorum yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD. Kejadian pemberhentian ini adalah pertama kalinya, disaat Faidah, MMR menjadi perempuan pertama yang berhasil memenangkan pemilihan Bupati Jember.

Tulisan ini untuk melengkapi kekurangan studi yang ada, menemukan retaknya hubungan antara executive dan legeslative, yang berakhir pemakzulan Bupati. Sejauh ini studi yang membahas tentang disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif setelah masa pemilihan kepala daerah langsung. Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa power sharing dan relasi kewenangan memegang peranan sangat penting dalam membangun komunikasi politik antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga tercipta kehidupan demokrasi berkeadilan yang dirasakan manfaatnya bagi khalayak masyarakat banyak dan kebijakana yang berpihak bagi publik: pertama, membangun relasi kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Kedua, pemerintahan daerah

dan administrasi kebijakan publik. Ketiga, implikasi terhadap roda pemerintahan daerah dan sosial masyarakat dan proses demokrasi di aras lokal.

Kepemimpinan Perempuan politik. Seiring dengan perkembangan zaman, perempuan juga ikut berpartisipasi di arena politik seperti halnya laki-laki khususnya di negara-negara berkembang. Kepemimpinan perempuan juga berdampak terhadap ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat. Di India terdapat temuan penelitian tentang partisipasi perempuan di ranah politik disebabkan adanya kesenjangan gender yang cukup luas. dengan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan mampu menyuarakan aspirasi dan harapan kaum perempuan secara efektif. (Bullough et al., 2012).

Secara garis besar perempuan bisa sukses karena ada beberapa faktor, semangat dan kemauan perempuan itu sendiri, dukungan dari keluarga, mempunyai lingkungan pertemanan yang mendukung, mempunyai perencanaan manajemen yang bagus (Ford & Pande, 2011; Mendelberg & Karpowitz, 2016; O'Brien & Rickne, 2016) Wanita baru-baru ini memperoleh keuntungan dramatis dalam politik elektoral, memenangkan sejumlah posisi penting dalam kepemimpinan nasional dan rekor jumlah kursi di parlemen di seluruh dunia. Artikel ini mensurvei dan menganalisis perkembangan ini, berusaha memahami mengapa representasi perempuan meningkat di beberapa negara tetapi tidak di negara lain, serta apa yang ditunjukkan oleh pola-pola ini tentang perubahan status perempuan dalam kehidupan politik (Tentang et al., 2011). Ini diakhiri dengan beberapa refleksi tentang sifat gender dari ruang publik dan apa arti pergeseran ini bagi perempuan sebagai sebuah kelompok (Jalalzai & Krook, 2010).

E.Harmer mengemukakan tentang gender dan model Kekuatan Kepemimpinan di Amerika dan Pakistan: gaya Kepemimpinan perempuan, kepemimpinan transformasional media dan representasi kepemimpinan mediatisasi dan personalisasi politik budaya populer dan kepemimpinan media baru. Liputan Media tentang Visibilitas pemimpin wanita antara kuantitas dan kualitas, bagaimana menghapus stigma negatif dan bayang –bayang stereotip. Media mampu melatih dan menjadikan perempuan menjadi pemimpin di masa depan. Peran ganda, sifat feminitas. Kompetensi menjadi kekuatan utama bagi seorang perempuan. Terdapat perempuan sebagai Ibu di saat menjadi pemimpin terlalu feminin, tetapi ada pula kasus Segolene Royal saat pemimpin wanita terlalu kuat: seperti kasus Hillary Clinton muncul menjadi pemimpin perempuan dan berpartisipasi dalam kekuasaan Negara. dan Faktor fashionable dan baiknya seorang ibu dan siteri menjadikan perempuan masuk dalam lingkaran politik dinasti, ketika putri atau isteri memasuki domain politik kekuasaan. Upaya mencari gaya baru kepemimpinan politik krisis masa kepemimpinan demokratis tradisional untuk merosotnya kepemimpinan media sebagai agen referensi transformasi (Harmer, 2014).

Strukturalisme fungsionalisme menurut Dahrendorf bahwa pendekatan struktural yang merupakan fungsionalisme, memandang manusia sebagai paradigma ganda. (Dahrendorf, 1959). Pada satu ujung memiliki konflik, sementara yang lain memiliki konsensus. Keduanya memiliki timbal balik relasi antar manusia. Konsensus diperoleh dari integrasi nilai. Sistem sosial adalah kerjasama sukarela terpadu dan / atau consen-sus bersama-sama. Dalam sebuah komunitas, konflik terjadi adalah antara pseudo dan kelompok kepentingan yang nyata dan laten. Masyarakat tidak ada tanpa konsensus dan konflik menjadi re-quirements

masing-masing ((Toffler, 2002)). Ini berarti tidak ada konflik yang terjadi tanpa konsensus sebelumnya, dan sebaliknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi ini menggunakan fungsionalisme struktural Dahrendorf, sebagai paradigma untuk mengeksplorasi dan memahami masalah kehidupan manusia, sejarah, budaya, dan hubungannya dengan lingkungan (Becker, 1986; Li et al., 2017). Manusia dipelajari sebagai elemen fungsional dalam berbagai struktur bawah sadar, menggunakan roda kecil dalam mekanisme otonom. Fungsi terletak pada struktur dan manusia tidak dilihat sebagai subjek, melainkan sebagai produk struktur (Al-Ghamdi, 2021; Warczok & Beyer, 2021), Struktur dan fungsi tidak berjalan secara terpisah, mereka justru berjalan beriringan. Peran penataan menandai fungsi, di sisi lain, disfungsi menandai kematian struktur.

Asumsi struktural fungsionalisme Dahrendorf menjelaskan manfaat suling-suling; (1) itu membawa keseimbangan bagi masyarakat, (2) menekankan keteraturan dalam masyarakat, (3) setiap elemen memainkan peran dalam stabilitas utama, (4) bahwa masyarakat secara informal terikat oleh norma, nilai, dan moral, dan (5) kohesi diciptakan oleh nilai bersama. Kemanjuran dan efektivitas resolusi terkait dengan tiga upaya komprehensif untuk menemukan perdamaian; (1) kedua belah pihak mengakui situasi dan realitas konflik, (2) ada organisasi kepentingan untuk memahami tuntutan pihak lain, dan (3) keduanya menyetujui aturan keterlibatan yang lain untuk menjembatani interaksi. Perspektif Dahrendorf yang mengakui konflik sebagai diferensiasi otoritas didamaikan melalui pemulihan struktur dan fungsi. Pemulihan otoritas

adalah sentuhan mendalam dari subcon-scious tentang posisi dan fungsinya. Hal ini dianalisis melalui hermeneutika mekanisme interpretasi di mana unsur-unsur menjelaskan keseluruhan dan sebaliknya, yang terdiri dari sejarah, budaya, religiusitas, nilai-nilai, dan norma-norma. Peran penataan tidak selalu mutlak, namun dilengkapi dengan fungsi. Juga, fungsi tidak memainkan peran absolut yang dilegitimasi oleh struktur.

Teori Konflik Dalam Relasi kewenangan: Konflik kewenangan antara legislatif dan eksekutif. Legislatif mempunyai kewenangan merancang Undang-Undang, mengontrol birokrasi eksekutif, dan fungsi anggaran. Penggunaan control legislatif dipengaruhi oleh institusi partai politik, jadi strategi kontrol yang optimal juga bergantung pada aksi antar konflik kepentingan, biaya tawar menawar, kapasitas negosiasi aktor kekuasaan yang kesemuanya dilatar belakangi oleh kepentingan partai politik yang sangat beragam dalam sistem (Ismawati et al., 2019; Miski, 2017). Jika ada konflik maka legislatif memiliki kapasitas terlibat dalam kontrol untuk mengendalikan birokrasi (Oedi et al., 2020), maka biaya negosiasi akan meningkatkan peluang konflik antara kedua lembaga yakni legislatif dan executive. (Astuti et al., 2019). Power sharing adalah tentang bagaimana berbagi keputusan, seperti hasil penelitian Ross & coutts di Vietnam menemukan bahwa para nelayan di Tan Giang memiliki ruang terbatas untuk membuat keputusan berdasarkan otoritas pemerintah dan lemahnya lembaga hukum. (Ho et al., 2015). relasi kekuasaan merupakan aspek penting dari manajemen, harus ada kerjasama antara kedua belah pihak (Zurba et al., 2012).

Tujuan penulisan penelitian ini untuk melengkapi kekurangan studi yang telah ada, hanya mengurai konflik antara kepala daerah dan DPRD, untuk tulisan ini membahas konflik, relasi kewenangan, ada sanksi administrasi dari kemendagri, yang berakhir dengan pemakzulan Bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejalan dengan itu makanterdapat tiga pertanyaan yang dirumuskan: (a) Bagaimanakah disharmoni antara kepemimpinan perempuan dan legislatif berakhir dengan pemakzulan Bupati Jember?, (b) Faktor faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemakzulan bupati perempuan pertama di Jember?, (c) Bagaimanakah relasi kewenangan dan antara Eksekutif sebagai pengambil kebijakan dan legislatif dalam menjalankan fungsi pembuat peraturan daerah, anggaran, dan control, mempengaruhi proses jalannya pemerintahan?. Ketiga pertanyaan ini menjadi penting dipertanyakan. Ketiga pertanyaan penting diajukan mengingat semakin banyaknya fenomena konflik antara eksekutif dan legislatif dalam konteks proses demokrasi dan dinamika politik lokal di Indonesia. Kajian tentang implikasi dari konflik inilah yang perlu dikaji bersama untuk diperhatikan.

METODE PENELITIAN

Permasalahan relasi kewenangan dan konflik antara kepemimpinan perempuan politik sebagai kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, merupakan gambaran betapa buruknya komunikasi politik diantara keduanya. Sebagaimana yang tunjukkan pemerintahan yang terbelah membawa resiko terhambatnya roda pemerintahan. Kasus yang diangkat dalam hal ini terjadi di pemerintahan kabupaten Jember dan DPRD. Hal ini dipilih karena pemerintahan yang harmonis memberikan kesempatan kepada DPRD

melakukan Interpelasi dan Pemakzulan terhadap Bupati terpilih yang telah memerintah lima tahun.

Data yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan prespektif studi kasus. Studi kasus penelitian analisis deskriptif, melalui pendekatan yang difokuskan pada studi kasus terbelahnya pemerintahan dan buruknya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di kabupaten Jember. Dengan cara penguraian laporan akademik menggunakan pendekatan kronologis konflik dan disharmoni komunikasi politik yang terjadi antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember masa periode 2014-2019. Dan puncak dari konflik adalah pemberhentian yang di sahkan secara korum dengan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD kabupaten Jember periode 2019-2024.

Data selanjutnya dianalisis senada dengan (Farah et al., 2020; Oubrich et al., 2021; Wyatt & Silvester, 2018): menentukan permasalahan penelitian, memilih individu untuk diteliti dan dicari cerita dan kisahnya dari berbagai sumber baik dokumentasi dan dari internet, mengumpulkan cerita melalui majemuk informasi dari berbagai pihak, mengumpulkan cerita dari konteks cerita yang dipilih. Analisis naratif dengan cara mengumpulkan deskripsi dari cerita penelitian tersebut, kemudian menyusun menjadi laporan akademik dengan menggunakan alur cerita dalam pedoman laporan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Kepemimpinan Bupati Perempuan Pertama di Jember

Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah langsung pada sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Menjadi peluang bagi Faida

yang mempunyai profesi sebagai dokter dan saat itu menjabat sebagai direktur rumah sakit Bina Sehat di Jember. Faida mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Jember Jawa Timur periode 2015-2020, dan terpilih menjadi Bupati perempuan pertama di Jember. Tetapi seiring perjalanan waktu disaat berkuasa muncullah disharmoni dan miskomunikasi antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Jember sudah berlangsung sekian lama, sehingga menyebabkan hubungan yang tidak harmonis. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang perjalanan politik Bupati Faida:

Potret riwayat politik dr.Hj. Faida MMR Menang dan terpilih menjadi Bupati Jember periode 2016-2021. Di dampingi Wakil Bupati KH. Abdul Muqid. Mereka dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Graha Surabaya. Terdiri dari beberapa partai pengusung yakni; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Nasional Demokrat (NASDEM), memperoleh 525.519 Suara. Sedangkan lawannya yang kalah adalah Sugiharto sebagai calon Bupati dan Dwi sebagai calon wakil Bupati, mereka diusung oleh 3 partai politik yakni; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

B. Konflik Bupati dan DPRD dalam Pemerintahan

Pada hakekatnya Bupati sebagai kepala daerah mempunyai wewenang sebagai pengambil kebijakan. Hubungan dengan kelompok masyarakat dan masyarakat luas sudah sangat baik namun terjadi miskomunikasi dan relasi yang tidak harmonis dengan legislatif, sehingga muncul berbagai permasalahan yang merugikan banyak pihak. Antara lain berdampak

terhadap gagalnya pengesahan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Jember. Sehingga pemerintahan kabupaten diberikan surat peringatan dari kementerian dalam negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI). Sanksi administrasi juga datang dari Gubernur Jawa Timur, perihal tidak menerima tunjangan dan tidak menerima gaji. Sehingga DPRD mengambil keputusan mengadakan sidang pemakzulan atau pemberhentian Bupati perempuan pertama di Jember. A Gagalnya Komunikasi politik antara Bupati dan legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jember, berusaha mencegah Bupati Pertahana maju mencalonkan kembali menjadi Kepala Daerah periode 2019-2024, karena semua hasil survey mengunggulkannya. Maka sebagai upaya antisipasi parpol diparlemen menunjukkan abuse of power. Karena alasan inilah, akhirnya Bupati Faidah sebagai kepala daerah pertahana mencalonkan diri kembali melalui jalur perseorangan.

Adapun dampak konflik Bupati dengan DPRD diantaranya; 1) gagal mengesahkan APBD, 2) diberi peringatan oleh Kementerian dalam negeri, 3) Sanksi administrasi dari Gubernur Jawa Timur : tidak menerima tunjangan, tidak menerima gaji, 4) Pemakzulan Bupati. Demikian dampak yang ditimbulkan dari konflik antara Bupati dengan DPRD sangat merugikan masyarakat luas. Seharusnya Bupati sebagai kepala daerah mempunyai wewenang sebagai pengambil kebijakan. Dan didukung sepenuhnya oleh lembaga legislatif. Sehingga pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu. Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan surat peringatan kepada pemerintahan daerah. Pun juga Gubernur Jawa Timur menjatuhkan sanksi administrasi dengan

tidak ada penerimaan Tunjangan gaji. Persoalan rumit inilah yang menjadi dasar pemakzulan Bupati oleh DPRD Jember.

C. Faktor Pemicu pemakzulan Bupati Perempuan di Jember

Hancurnya relasi dan gagal komunikasi antara DPRD dengan Faida Bupati Jember menyebabkan tidak ada satu partai politikpun di Parlemen yang memberikan rekomendasi menjadi calon Kepala Daerah 2019-2024. Langkah partai-partai politik ini dilakukan sebagai upaya abuse of power, seolah tidak gentar, Faida yang sedang menjabat Bupati Jember maju lagi mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah lagi melalui jalur independent. Berbagai upaya dilakukan DPRD untuk mencegah Bupati Pertahana maju, karena elektabilitasnya unggul dari hasil berbagai lembaga survey.

Faktor-faktor Kesalahan Bupati Pemicu Pemakzulan, sehingga DPRD Jember melakukan sidang paripurna: 1) Kabupaten Jember tidak memperoleh kuota CPNS Penyampaian hak menyatakan pendapat (HMP); 2) Melakukan Sidang paripurna Mutasi jabatan: 700 ASN tak sesuai prosedural Terbit surat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 3) Melakukan Sidang paripurna penyusunan kelembagaan yang dinilai menyalahi aturan hukum; 4) Melakukan Sidang paripurna Merubah Peraturan Bupati kedudukan, susunan organisasi tata kerja (KSOTK); 5) Memutasi aparatur sipil negara (ASN) dengan mengeluarkan 15 Surat Keputusan Bupati. Faktor-faktor inilah yang menjadi pemicu pemberhentian Bupati Faidah sebagai Bupati Jember. Disaat masa jabatannya belum berakhir ada upaya pemakzulan Bupati oleh 45 anggota

DPRD Jember. Pemakzulan ini dilakukan dengan alasan karena dinilai bupati banyak melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN

Relasi hubungan dan komunikasi politik yang terbelah antara kepala daerah dengan DPRD menyebabkan banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat.

Rekomendasi dan saran pada penelitian ini adalah, sangat menyayangkan munculnya konflik sosial ini terjadi antara eksekutif dan legislatif apalagi di masa pandemi covid-19, seharusnya kepala daerah dan para politisi sebagai wakil rakyat memberikan manfaat dan tauladan bagi masyarakat. Seyogyang konflik-konflik kepentingan pribadi lebih dikesampingkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Diharapkan semua pimpinan mampu bekerja sama sehingga mampu memberikan solusi bagi masyarakat seperti kondusifitas, pemulihan ekonomi dimasa pandemi sekarang ini.

DAFTAR REFERENSI

- V Bailey, J. D. (2008). Constitutionalism, conflict, and consent: Jefferson on the impeachment power. *Review of Politics*.
<https://doi.org/10.1017/S0034670508000776>
- Bullough, A., Kroeck, K. G., Newburry, W., Kundu, S. K., & Lowe, K. B. (2012). Women's political leadership participation around the world: An institutional analysis. *Leadership Quarterly*.
<https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.010>
- Ford, D., & Pande, R. (2011). Gender Quotas and Female Leadership: A Review. *World Development Report 2012*.
- Harmer, E. (2014). Women Political Leaders and the Media. *European Journal of Communication*. Al-Ghamdi, N. A. (2021). Ideological representation of fear and hope in online newspaper reports on COVID-

- 19 in Saudi Arabia. *Heliyon*, 7(4), e06864.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06864>
- Bailey, J. D. (2008). Constitutionalism, conflict, and consent: Jefferson on the impeachment power. *Review of Politics*, 70(4), 572–594.
<https://doi.org/10.1017/S0034670508000776>
- Becker, H. (1986). *Writing for Social Scientists, Personality and Authority*.
- Bullough, A., Kroeck, K. G., Newburry, W., Kundu, S. K., & Lowe, K. B. (2012). Women's political leadership participation around the world: An institutional analysis. *Leadership Quarterly*.
<https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.010>
- Farah, B., Elias, R., De Clercy, C., & Rowe, G. (2020). Leadership succession in different types of organizations: What business and political successions may learn from each other. *Leadership Quarterly*, 31(1), 101289. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.03.004>
- Ford, D., & Pande, R. (2011). Gender Quotas and Female Leadership: A Review. *World Development Report 2012*, 1–44.
- Harmer, E. (2014). Women Political Leaders and the Media. *European Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1177/0267323114531871d>
- Ho, N. Al-Ghamdi, N. A. (2021). Ideological representation of fear and hope in online newspaper reports on COVID-19 in Saudi Arabia. *Heliyon*, 7(4), e06864. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06864>
- Astuti, P., Afandi, M. A., & Listyani, R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13.
- Becker, H. (1986). *Writing for Social Scientists, Personality and Authority*.
- Bullough, A., Kroeck, K. G., Newburry, W., Kundu, S. K., & Lowe, K. B. (2012). Women's political leadership participation around the world: An institutional analysis. *Leadership Quarterly*.
<https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.010>
- Farah, B., Elias, R., De Clercy, C., & Rowe, G. (2020). Leadership succession in different types of organizations: What business and political successions may learn from each other. *Leadership Quarterly*, 31(1), 101289. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.03.004>
- Ford, D., & Pande, R. (2011). Gender Quotas and Female Leadership: A Review. *World Development Report 2012*, 1–44.
- Harmer, E. (2014). Women Political Leaders and the Media. *European Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1177/0267323114531871d>
- Ho, N. T. T., Ross, H., & Coutts, J. (2015). Power sharing in fisheries co-management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. *Marine Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.006>

- Ismawati, R. D., Rohadi, R., & Nulhaqim, S. A. (2019). PERAN POLITIK CEU POPONG DALAM MEMBANGUN BANGSA YANG HARMONI. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i2.23236>
- Jalalzai, F., & Krook, M. L. (2010). Beyond hillary and Benazir: Women's political leadership worldwide. *International Political Science Review*, 31(1), 5–21. <https://doi.org/10.1177/0192512109354470>
- Li, T., Munir, Q., & Abd Karim, M. R. (2017). Nonlinear relationship between CEO power and capital structure: Evidence from China's listed SMEs. *International Review of Economics and Finance*, 47(October 2016), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.09.005>
- Mendelberg, T., & Karpowitz, C. F. (2016). Women's authority in political decision-making groups. *Leadership Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.11.005>
- Miski. (2017). Dinamikan politik elite NU (studi tentang perbedaan preferensi politik kiai Jawa Timur pada pemilihan presiden 2014). In *M.A Thesis*.
- O'Brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). Gender quotas and women's political leadership. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/S0003055415000611>
- Oedi, R. F., Erawan, E., Dwivayani, K. D., & Mulawarman, U. (2020). *Strategi Humas Polisi Resort Kota Samarinda dalam Menangani Berita Hoax di Samarinda*. I(1), 52–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jasima.v1i1.17>
- Oubrich, M., Hakmaoui, A., Benhayoun, L., Solberg Söilen, K., & Abdulkader, B. (2021). Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment. *Journal of Business Research*, 137(November 2020), 488–499. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.045>
- Tentang, K., Perempuan, K., & Utara, S. (2011). *Perempuan pemelukada*.
- Toffler, A. (2002). *Futureshock*. Printed in The United of America.
- Warczok, T., & Beyer, S. (2021). The logic of knowledge production: Power structures and symbolic divisions in the elite field of American sociology. *Poetics*, 87(March 2020), 101531. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101531>
- Wyatt, M., & Silvester, J. (2018). Do voters get it right? A test of the ascription-actuality trait theory of leadership with political elites. *Leadership Quarterly*, 29(5), 609–621. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.02.001>

- Zurba, M., Ross, H., Izurieta, A., Rist, P., Bock, E., & Berkes, F. (2012). Building co-management as a process: Problem solving through partnerships in Aboriginal Country, Australia. *Environmental Management*. <https://doi.org/10.1007/s00267-012-9845-2>
- T. T., Ross, H., & Coutts, J. (2015). Power sharing in fisheries co-management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.006>
- Huber, J. D., Shipan, C. R., & Pfahler, M. (2001). Legislatures and Statutory Control of Bureaucracy. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.2307/2669344>
- Jalalzai, F., & Krook, M. L. (2010). Beyond hillary and Benazir: Women's political leadership worldwide. *International Political Science Review*, 31(1), 5–21. <https://doi.org/10.1177/0192512109354470>
- Li, T., Munir, Q., & Abd Karim, M. R. (2017). Nonlinear relationship between CEO power and capital structure: Evidence from China's listed SMEs. *International Review of Economics and Finance*, 47(October 2016), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.09.005>
- Mendelberg, T., & Karpowitz, C. F. (2016). Women's authority in political decision-making groups. *Leadership Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.11.005>
- O'Brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). Gender quotas and women's political leadership. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/S0003055415000611>
- Oubrich, M., Hakmaoui, A., Benhayoun, L., Solberg Söilen, K., & Abdulkader, B. (2021). Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment. *Journal of Business Research*, 137(November 2020), 488–499. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.045>
- Toffler, A. (2002). *Futureshock*. Printed in The United of America.
- Warczok, T., & Beyer, S. (2021). The logic of knowledge production: Power structures and symbolic divisions in the elite field of American sociology. *Poetics*, 87(March 2020), 101531. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101531>
- Wyatt, M., & Silvester, J. (2018). Do voters get it right? A test of the ascription-actuality trait theory of leadership with political elites. *Leadership Quarterly*, 29(5), 609–621. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.02.001>
- Zurba, M., Ross, H., Izurieta, A., Rist, P., Bock, E., & Berkes, F. (2012). Building co-management as a process: Problem solving through

- partnerships in Aboriginal Country, Australia. *Environmental Management*. <https://doi.org/10.1007/s00267-012-9845-2>
- <https://doi.org/10.1177/0267323114531871d>
- Ho, N. T. T., Ross, H., & Coutts, J. (2015). Power sharing in fisheries co-management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.006>
- Huber, J. D., Shipan, C. R., & Pfahler, M. (2001). Legislatures and Statutory Control of Bureaucracy. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.2307/2669344>
- Jalalzai, F., & Krook, M. L. (2010). Beyond hillary and Benazir: Women's political leadership worldwide. *International Political Science Review*. <https://doi.org/10.1177/0192512109354470>
- Mendelberg, T., & Karpowitz, C. F. (2016). Women's authority in political decision-making groups. *Leadership Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.11.005>
- O'Brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). Gender quotas and women's political leadership. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/S0003055415000611>
- Zurba, M., Ross, H., Izurieta, A., Rist, P., Bock, E., & Berkes, F. (2012). Building co-management as a process: Problem solving through partnerships in Aboriginal Country, Australia. *Environmental Management*. <https://doi.org/10.1007/s00267-012-9845-2>